

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *CAPJIEKIA*  
(STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**DHERI SETYAWAN PUTRA NUGRAHA  
C100140194**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *CAPJIEKIA*  
(STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**DHERI SETYAWAN PUTRA NUGRAHA**  
**C.100.140.194**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing:



Hartanto, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *CAPJIEKIA*  
(STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI)**

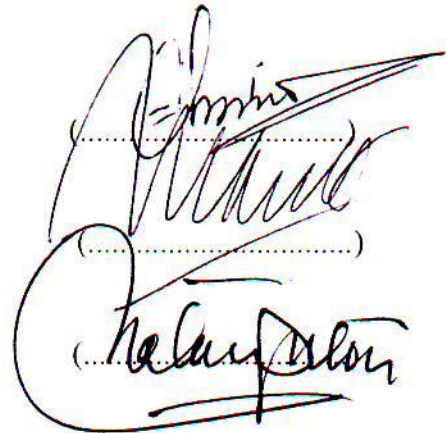
Oleh:

**DHERI SETYAWAN PUTRA NUGRAHA**  
**C100140194**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 31 Desember 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Februari 2019

Penulis



Dheri Setyawan Putra Nugraha  
C100140194

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *CAPJIEKIA* (STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI)**

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah; (a) Mengetahui peran kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian *Capjiekia*; (b) Mengetahui kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian; (c) Mengetahui Penegakan hukum terjadinya tindak pidana perjudian *Capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali. Pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian Deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara jelas mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *Capjiekia* dan penegakan hukumnya di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan Hasil penelitian bahwa; (a) Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka dari pelaku judi *Capjiekia* dan menyita barang bukti dengan tujuan untuk mengungkap modus dari perjudian *Capjiekia*; (b) Polres Boyolali menemukan aparat yang menjadi penjaga setiap operasi mereka, Kurangnya sarana yang memadai menjadi penghambat bagi Polres Boyolali, Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum; (c) melakukan Tindakan preventif (Non-penal) dan Tindakan Preventif terkait perjudian.

**Kata Kunci:** permainan judi, penyidikan polisi, penyelesaian hukum

### **Abstract**

The purpose of this study is; (a) Knowing the role of the police in enforcing the law of *Capjiekia* gambling; (b) Knowing the police obstacles in overcoming gambling crime; (c) Knowing the law enforcement of the crime of *Capjiekia* gambling in the jurisdiction of the Boyolali Regional Police. Collecting data that is needed or used as this research material uses the following methods: The method of approach used in this study is the Empirical approach, namely the effort to approach the problem under study with the nature of the law that is real or in accordance with the reality that exists in society. The type of research that will be used is Descriptive research, which is a study that aims to provide a clear picture of criminal law policies in dealing with criminal acts of *Capjiekia* gambling and law enforcement in the Regency Boyolali. Based on the results of the study that; (a) The police make arrests of suspects from Gambjiekia gamblers and confiscate

evidence for the purpose of uncovering the mode of *Capjiekia* gambling; (b) Boyolali Regional Police found officers who were guardians of each of their operations, Lack of adequate facilities became a barrier for Boyolali Regional Police, Lack of public trust in law enforcement officers; (c) conduct preventive actions (Non-reasoning) and Preventive Actions related to gambling.

**Keywords:** gambling games, police investigations, legal settlement

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum *Erropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law* yang tentunya berbeda dengan sistem Hukum anglo saxon. Menurut Achmad Ali Dalam aturan undang-undang dasar 1945 negara republik Indonesia telah di tuliskan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa: “Negara ini diatur dalam kesatuan sistem hukum dengan penegasan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai media untuk mencapai yang diinginkan oleh bangsa Indonesia”.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara Hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah di buat oleh pembentukan undang-undang yang harus ditaati dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan penegak hukum sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo “Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan manusia”.<sup>2</sup>

Sudikno menjelaskan perjudian pada hakikatnya adalah “perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 11.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 160.

<sup>3</sup>Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma, hal. 1.

Salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat kita adalah perjudian *Capjiekia*. Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi *Capjiekia* kian membuat masyarakat menjadi resah. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dan bagaimana langkah petugas penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menanggulangi suatu tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu perjudian ini harus ditindak lebih, sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjudian seperti ini dapat merusak citra lingkungan setempat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana meskipun cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan sangat pesat, karena upaya penanggulangan tindak pidana yang setengah hati dalam memberantas perjudian menyebabkan banyak yang tidak bisa teratasi dengan baik dan sering kali terbengkalai.

Definisi judi atau perjudian menurut Kartini Kartono adalah “pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.<sup>4</sup>

Salah satu tantangan yang dihadapi dari pihak penegak hukum dalam tugasnya adalah adanya kesenjangan sosial masyarakat atas tugas-tugas penegak hukum seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun itu juga tantangan dari penegak hukum adalah kurang kuatnya dalam menindak bahkan ada juga para bandar *Capjiekia* yang menyewa atau menggunakan jasa keamanan Negara Seperti TNI dan POLISI yang bisa memberikan jalan aman agar usah mereka dalam menjual atau menawarkan

---

<sup>4</sup>Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 65.

judinya tidak diusik oleh penegak hukum bahkan mereka berani membayar mahal agar usaha mereka aman.

Sementara itu, di Indonesia sendiri kasus tindak pidana judi *Capjiekia* sudah marak di “Boyolali tepatnya di Dukuh Celengan, Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali tanggal Selasa, 12 Nopember 2013 yang dilakukan oleh Agung Widodo (36), warga Jepangan RT 03/01 Manggung Ngemplak Boyolali.”<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk kejahatan. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP bis (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- (1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- (2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.

Kasus mengenai tindak pidana perjudian khususnya Judi *Capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali dengan semakin bertambahnya beban kehidupan masyarakat terutama yang mempunyai anak laki-laki yang baru saja lulus Sekolah Menengah Atas karena menjadikan perjudian *Capjiekia* ini menjadi pekerjaan sampingan yang dirasa pas untuk menghasilkan uang dengan cara yang lebih cepat tidak memerlukan banyak waktu dan mengeluarkan banyak tenaga khususnya di wilayah kabupaten Boyolali dan sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian *Capjiekia*?; (2) Apa kendala

---

<sup>5</sup>Republika.co.id, Selasa 12 Nopember 2013 09:30 WIB: Kasus Bandar Judi Ditangkap Polisi Boyolali, dalam <http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/11/12mw4pgp-bandar-judi-ditangkap-polisiboyolali> diakses Sabtu 24 Maret 2018 pukul 03:46 WIB.



kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian? (3) Bagaimana Penegakan hukum terjadinya tindak pidana perjudian *Capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali? Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui peran kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian *Capjiekia*; (2) Mengetahui kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian; dan (3) Mengetahui Penegakan hukum terjadinya tindak pidana perjudian *Capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Jadi pendekatan empiris menurut Hilma Hadikusuma “harus dilaksanakan dilapangan, dapat menggunakan metode dan tehnik penelitian lapangan”.<sup>6</sup>

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian deskriptif, yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikansuatu gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti tentang suatu gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat tertentu”.<sup>7</sup> Dapat diperoleh analisis dan kenyataan lapangan secaa jelas mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *Capjiekia* dan penegakan hukumnya di Kabupaten.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Capjiekia***

Peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian *Capjiekia* sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik

---

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembaharuan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung :Mandar Maju, hal. 61

<sup>7</sup>Sukandar Rumudi, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 104.

peraturan mengenai Kepolisian dalam hal ini penyidik maupun undang-undang yang terkait dengan perjudian.

*Cap Jie Kia* adalah “permainan judi memakai kartu *ce kie* yang hanya diambil dua belas kartu dari keseluruhan kartu *ce kie*-nya, yang mana salah satunya dipilih oleh bandar kemudian diletakkan atau dimasukkan kotak tertutup dan kemudian digantung”. Para penjudi membeli kupon yang disediakan oleh bandar melalui agen atau tambang untuk menebak salah satu dari 12 (dua belas) kartu *ce kie* yang telah ditentukan tersebut. Kalau beruntung akan mendapat 10 kali uang taruhan (9 kali + harga pembelian kupon). Setiap penarikan bandar akan mengeluarkan selembar kertas fotocopyan yang berisi petunjuk/sonji/sanepa dalam bahasa Jawa. Tetapi biasanya sanepa yang diberikan bandar bisa mempunyai arti yang banyak dan sering membingungkan, setiap hari bisa 5 sampai 7 kali penarikan, ada yang menggunakan jam ganjil setiap penarikannya, ada juga yang menggunakan jam genap setiap penarikannya.

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan Polres Boyolali dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita.

Acara Penyitaan Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai. Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat/benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: (1) Tidak terdapat cukup bukti; (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau (3) Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena: (a) Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi); (b) Kadaluwarsa penuntutannya; (c) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali; (d) Perkara tidak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan (e) Penyelesaian di luar siding pengadilan.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya. Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas

perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.

### **3.2 Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian**

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembalasan dari oknum-oknum tertentu pelaku melarikan diri, faktor budaya dan masyarakat serta dari kepolisian sendiri.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

#### **3.2.1 Faktor Hukum**

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak

tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

### 3.2.2 Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3.2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi

sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

#### 3.2.4 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 3.2.5 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan,

sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

### **3.3 Penegakan Hukum Terjadinya Tindak Pidana Perjudian *Capjiekia* di Wilayah Hukum Polres Boyolali**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang terjadi sejak lama bahkan sampai saat ini, dan tingkat tindak pidana perjudian cukup tinggi di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Boyolali, perjudian yang sekarang yang lagi marak di Kabupaten yang dijuluki Kota Susu ini adalah perjudian *Capjiekia*. Karena *Capjiekia* merupakan penyakit masyarakat yang meski atau harus diobati, dan harus dimusnahkan karena telah meresahkan masyarakat, untuk mengantisipasi itu semua pihak Kepolisian harus bekerja lebih giat lagi agar terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan. Dalam menegakkan hukum pidana polisi sebagai unsur utama dan posisi paling depan berhadapan dengan kejahatan, untuk mewujudkan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang terkendali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok polisi adalah: (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (b) Menegakkan hukum. (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya preventif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan yang baru pertama kali akan dilakukan dengan seseorang. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu:

3.3.1 Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelajar. Arti pentingnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mendidik masyarakat supaya mereka mengerti hukum, sehingga mereka akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Sebagai implikasi penyuluhan hukum di masyarakat, khususnya para orang tua, pemuda dan remaja perlu dilakukan sedini mungkin dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

3.3.2 Melakukan Razia. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dalam melakukan upaya preventif dengan melakukan razia ketempat yang rawan terjadi kejahatan perjudian. Razia ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menaggulangi kajahatan perjudian.

Upaya represif merupakan upaya yang memerlukan tindakan kepolisian dalam menagani kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah:

*Pertama*, melakukan penyidikan. Kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi yang dilaporkan oleh saksi atau mungkin juga polisi yang bertugas. Dalam hal ini pemeriksaan polisi terhadap suatu peristiwa kejahatan melalui pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan. Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penuntutan, dimana berkas yang telah disidik oleh



penyidik diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk urusan selanjutnya. Setelah menerima surat pemberitahuan model P-21, maka tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan ke tahap II. Jika proses penuntutan telah selesai, penuntut umum melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

*Kedua*, Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga milik negara, yang menjadi tempat para pelaku kejahatan dalam melaksanakan hukuman yang diberikan kepadanya. Lembaga pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat para pelaku menjalankan hukuman, mereka juga dididik dan dibina serta dibekali suatu keterampilan agar kelak setelah mereka bebas, mereka menjadi orang yang berguna dan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat.

### **3.4 Judi dalam Perspektif Islam**

*“Judi adalah setiap-tiap permainan yang mensyaratkan pihak pemenang mengambil sesuatu (harta) dari pihak yang kalah.” (kullu la’bin yasytarithu fiihi an ya’khudza al ghaalibu minal maghluubi syai’an).* Dari definisi judi tersebut, terdapat 3 (tiga) kriteria pokok judi, diantaranya yaitu: *Pertama*, ada taruhan (*muraahanah*) berupa harta (uang dan sebagainya) dari pihak yang berjudi, bisa satu pihak, atau lebih. *Kedua*, ada permainan (*la’bun*) yang fungsinya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Misalnya dadu (*an nard*), catur, domino, kartu, dan sebagainya. Disamakan dengan permainan, adalah segala macam perlombaan (*musabaqah*), seperti sepakbola, pacuan kuda, balapan lari. *Ketiga*, adanya pihak yang menang dan yang kalah, yakni pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

#### **4.1.1 Peran Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Capjiekia***

Kepolisian Polres Boyolali melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian *Capjiekia* apabila sudah terbukti bersalah melakukan perjudian

*Capjiekia* maka Kepolisian Polres Boyolali akan menindak lanjuti kasus ini. Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka dari pelaku judi *Capjiekia* dan menyita barang bukti dengan tujuan untuk mengungkap modus dari perjudian *Capjiekia*. Penahanan jika alat bukti cukup maka kepolisian melakukan penahanan kepada pelaku judi *Capjiekia*. BAP mengenai pelaku perjudian dari kepolisian diserahkan kepada JPU untuk diperiksa.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: (a) Tidak terdapat cukup bukti; (b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau (c) Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena: tersangka meninggal dunia.

#### 4.1.2 Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Adanya pembalasan kejahatan perjudian dalam hal ini bukanlah hanya cerita bohong. Polres Boyolali selalu saja menemukan aparat yang menjadi penjaga tersebut dalam setiap operasi mereka. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dapat disebabkan karena adanya pembalasan perjudian oleh aparat tersebut tentu yang menyalahgunakan kewenangannya serta aparat penegak hukum tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus perjudian secara tuntas.

#### 4.1.3 Penegakan Hukum Terjadinya Tindak Pidana Perjudian *Capjiekia* di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Tindakan Preventif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Deteksi dini yang dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala terjadinya permasalahan yang diperkirakan akan muncul dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### 4.1.4 Judi Dalam Perpektif Islam

*“Judi adalah setiap-tiap permainan yang mensyaratkan pihak pemenang mengambil sesuatu (harta) dari pihak yang kalah.” (kullu la’bin yasytarithu fiihi an ya`khudza al ghaalibu minal maghluubi syai`an).* Secara umum judi mudah menarik minat manusia sehingga menjadi penyakit yang susah diobati karena sifat buruk manusia yang rakus akan harta dan suka kepada kesenangan dan harta benda, lebih lagi jika kesenangan itu dijangkau dengan cepat dan mudah tanpa perlu berusaha keras.

#### 4.2 Saran

4.2.1 Diharapkan ke depannya Pihak Kepolisian, masyarakat, lembaga maupun komunitas sosial dapat meningkatkan perannya bekerjasama untuk menyelesaikan terkait dengan perjudian yang meresahkan warga.

4.2.2 Diharapkan kepada warga masyarakat Indonesia harus selalu ikut meningkatkan keamanan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat dan menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil terhadap anaknya agar kelak bisa tidak terpengaruh dengan adanya kejahatan perjudian yang sudah merebak di kalangan masyarakat Indonesia.

#### Persantunan

Karya ini saya persembahkan kepada: kedua orang tua saya yang tercinta segalanya, untuk dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, adikku tersayang atas dukungan dan semangatnya, keluarga yang turut serta mendukung mendoakan, sahabat dan teman-teman semua atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembaharuan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma

Rumudi, Sukandar, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Kartono, Kartini, 2009, *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta: Rajawali Press

### **Website/Internet**

Republika.co.id, Selasa 12 Nopember 2013 09:30 WIB: Kasus Bandar Judi Ditangkap Polisi Boyolali, dalam <http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/11/12mw4pgp-bandar-judi-ditangkap-polisiboyolali> diakses Sabtu 24 Maret 2018 pukul 03:46 WIB.

### **Peraturan Perundang-undangan**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tugas Pokok Polisi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana